

ANALISIS PENGARUH KORUPSI TEHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CORRUPTION ON INCREASING DEVELOPMENT IN INDONESIA

Tetti Flora Barutu¹, Devi Trianna²

Administrasi Negara, Universitas Pamulang Serang^{1,2}
email : tetti flora@gmail.com¹, devitrianna@gmail.com²

Accepted: Dec, 28th 2025 Published: Dec, 30th 2025

ABSTRAK

Korupsi adalah masalah yang mendasar dan sudah menghambat perkembangan

obstacle to regional development and healthy social change. Addressing corruption requires improved governance, transparency, law enforcement, digitization of bureaucratic procedures, and public participation to reduce corrupt practices and achieve sustainable and equitable development.

Keyword : Corruption, Regional Development, Social Change, Infrastructure.

*Corresponding author: tettiflora@gmail.com

E-ISSN 3123-7312

A. Pendahuluan

Korupsi telah menjadi masalah kronis yang menghambat pembangunan di Indonesia sejak masa penjajahan hingga era reformasi. Praktik korupsi tidak hanya merusak tatanan pemerintahan dan birokrasi, tetapi juga menggerogoti fondasi ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan regional, korupsi menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyebabkan ketimpangan pembangunan yang signifikan antara wilayah maju dan tertinggal (Amalia, 2022). Korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ke tangan segelintir elit, sehingga memperburuk disparitas dan menimbulkan masalah sosial yang luas.

Sejarah korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan. Saat itu, pemerintahan berlaku dengan sistem patrimonial dan feodal. Sistem ini membuat para bangsawan, pejabat kerajaan, dan para abdi dalem melakukan tindakan korup, seperti memanfaatkan uang hasil upeti dan kekuasaan. Perilaku seperti ini menjadi salah satu penyebab runtuhnya kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Saat penjajahan Belanda berlangsung, praktik korupsi tetap terus berlangsung. Belanda justru meniru sistem korup yang sudah ada sebelumnya. Mereka juga memanfaatkan kelemahan moral para penguasa lokal dengan cara politik *divide et impera*. Setelah Indonesia merdeka, korupsi tidak pernah benar-benar hilang. Pada masa Orde Lama, pemerintah pernah membentuk Operasi Budhi, tapi upaya itu tidak efektif. Di masa Orde Baru, pemerintah membentuk beberapa lembaga seperti Komite Empat, TPK, dan Opstib untuk menangani korupsi. Namun semua upaya tersebut tidak berhasil menghentikan korupsi, bahkan membuatnya semakin mengak

Tabel 1.1 Data Jumlah Penindakan Kasus Korupsi Oleh KPK

No	Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Inkract	Eksekusi
1	2004	23	2	2	0	0
2	2005	29	19	17	5	4
3	2006	36	27	23	14	13
4	2007	70	24	19	19	23
5	2008	70	47	35	23	24
6	2009	67	37	32	37	37
7	2010	54	40	32	34	36
8	2011	78	39	40	34	34
9	2012	77	48	36	28	32
10	2013	81	70	41	40	44
11	2014	80	58	50	45	48
12	2015	87	57	62	38	38
13	2016	96	99	76	71	81

et al., 2025); dan d). PT. ASABRI melakukan tindakan fraud berupa korupsi melalui kesepakatan transaksi saham investasi dan reksa dana yang ilegal, manipulasi data laporan keuangan yang menguntungkan pihak luar perusahaan. Tindakan ini melibatkan 9 tersangka atas dakwaan yang dilakukan dan diperkirakan telah menyebabkan kerugian bagi negara Indonesia sebesar Rp 22,78 triliun (Christian et al., 2023).

Ada banyak lagi kasus korupsi di Indonesia yang dapat merusak kepercayaan Masyarakat dan kualitas pembangunan di Indonesia menurun. Pertumbuhan ekonomi yang dilandasi oleh pemerataan pembangunan merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Namun, korupsi menghambat proses tersebut dengan menimbulkan distorsi dalam alokasi anggaran pembangunan, terutama pada proyek-proyek infrastruktur yang sangat vital bagi kemajuan daerah. Penelitian oleh Ariani (Ariani, 2023) menegaskan bahwa korupsi di sektor konstruksi dan infrastruktur terbukti menurunkan kualitas pelayanan publik dan menahan ekspansi produk domestik bruto (PDB) regional. Hal ini mengakibatkan rendahnya produktivitas ekonomi, menurunnya investasi, dan kualitas produk yang buruk, sehingga menimbulkan stagnasi pertumbuhan di banyak wilayah.

Korupsi yang meluas juga berdampak pada aspek sosial melalui melemahnya kepercayaan warga terhadap pemerintahan dan lembaga hukum. Masyarakat yang melihat kelemahan penegakan hukum dan praktek korupsi sistemik menjadi cenderung apatis dan kehilangan harapan akan perubahan. Konsekuensi sosial ini menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang memperparah masalah kemiskinan dan marginalisasi kelompok rentan. Korupsi melemahkan norma sosial dan integritas yang seharusnya mendukung keadilan serta solidaritas dalam masyarakat. Kondisi ini berpotensi memicu konflik sosial dan merusak harmoni komunitas.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dimulai secara yuridis pada era Orde Lama dengan beberapa regulasi awal, kemudian berkembang melalui reformasi kebijakan pada masa reformasi dan pemberlakuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Meski demikian, tantangan nyata tetap muncul dari akar sistemik yang mengakar dalam birokrasi dan politik. Kompleksitas ini membutuhkan pendekatan multidimensional, mulai dari penguatan hukum dan institusi anti

potensi ekonominya. Ketika dana yang dialokasikan untuk pembangunan daerah disalahgunakan, maka efektivitas pelaksanaan program pembangunan menurun drastis, menciptakan ketimpangan yang melebar dan memperburuk kesenjangan sosial antar wilayah. Misalnya, dana konstruksi infrastruktur yang digelapkan menyebabkan banyak jalan dan fasilitas umum dibangun dengan standar rendah, sehingga tidak bertahan lama dan membatasi konektivitas antar wilayah, padahal hal tersebut krusial bagi perkembangan ekonomi lokal.

Korupsi Akibat utama dari korupsi dalam pembangunan regional bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial kultural. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan korup cenderung menginternalisasi norma koruptif sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, melemahkan nilai-nilai etika dan kejujuran. Hal ini secara langsung mengikis kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, sehingga sulit membangun partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan publik.

Penelitian ini penting mengingat dampak multidimensi korupsi terhadap upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan aspek sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana korupsi memengaruhi dinamika pembangunan regional dan perubahan sosial di Indonesia secara sistemik, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-korupsi dalam konteks pembangunan nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan sepenuhnya berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi, serta dokumen penelitian terdahulu yang relevan dengan isu korupsi dan pembangunan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

D

mark-up biaya dan pengerjaan berkualitas rendah, sehingga infrastruktur tidak bertahan lama dan tidak mendukung pertumbuhan daerah secara optimal.

Ketimpangan antarwilayah menjadi semakin nyata akibat korupsi. Wilayah-wilayah yang memiliki sistem pengawasan lemah dan tingkat korupsi yang tinggi cenderung tertinggal dibandingkan wilayah lain yang lebih transparan. Contohnya, ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa yang relatif maju dengan wilayah luar Jawa seperti di Papua atau Nusa Tenggara. Dana pembangunan yang diselewengkan di daerah-daerah tertinggal memperparah jarak kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah tersebut dan pusat-pusat ekonomi utama (Putri, 2023).

Dampak lain dari korupsi adalah penurunan kualitas proyek pembangunan. Pengadaan barang dan jasa yang korup menghasilkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang tidak sesuai spesifikasi teknis, yang akhirnya berdampak pada menurunnya daya guna fasilitas tersebut. Kondisi ini melemahkan kemampuan daerah dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan daerah menghambat efektivitas belanja publik dan merusak infrastruktur (Keuangan, 2023).

Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi regional dengan mengurangi minat investor, terutama investor asing yang cenderung menghindari wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi dan ketidakpastian hukum. Akibatnya, daerah yang korup mengalami stagnasi ekonomi dan sulit mengembangkan sektor riil yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan kerja. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya institusi pemerintahan dan buruknya tata kelola yang berkontribusi pada rendahnya daya saing daerah secara keseluruhan (Akbar, 2025).

Dampak Korupsi Terhadap Perubahan Sosial

Korupsi memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap struktur sosial dan perilaku masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum. Ketika masyarakat mengalami korupsi secara langsung dalam pelayanan publik, seperti proses perizinan, pendidikan, atau kesehatan, maka

ketimpangan. Hal ini juga menimbulkan sikap negatif seperti kecemburuan sosial dan potensi konflik horizontal di masyarakat (Lamijan, 2022).

Perubahan perilaku masyarakat akibat korupsi juga tampak pada meningkatnya sikap permisif dan normalisasi korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak warga yang menganggap korupsi sebagai suatu hal yang lumrah atau bahkan perlu untuk mempercepat birokrasi. Kondisi ini mengikis nilai moral dan budaya anti-korupsi, serta menciptakan siklus korupsi yang sulit diputus. Apatisme politik juga menjadi dampak sosial yang nyata, di mana masyarakat cenderung menarik diri dari partisipasi politik karena merasa tidak memiliki pengaruh dan perubahan yang berarti.

Kualitas hidup masyarakat menurun karena korupsi menyebabkan anggaran pelayanan publik dialihkan untuk kepentingan pribadi, sehingga fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi sangat terbatas. Kondisi ini memperburuk standar hidup dan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah yang sudah mengalami keterbatasan pembangunan (Putri, 2023).

Studi Kasus Pembangunan di Indonesia

Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah pusat dan daerah, korupsi banyak ditemukan pada proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. Kasus-kasus korupsi proyek jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya praktik mark-up biaya, kolusi antara kontraktor dan pejabat daerah, serta penggunaan material berkualitas rendah. Proyek-proyek ini sering kali gagal memberikan manfaat maksimal karena kualitas pekerjaannya buruk dan rentan rusak cepat, menghambat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal (Kamil, 2019).

Birokrasi daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan cenderung mengalami lemahnya kontrol internal. Banyak pejabat daerah yang menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi tanpa akuntabilitas penuh. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dan partisipasi publik yang minim, sehingga praktik korupsi sulit diberantas dan berdampak langsung pada proyek dan kebijakan pembangunan (Amalia, 2022).

Contoh Kasus

Proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau yang dikenal sebagai Tol MBZ merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis bernilai kontrak sekitar Rp 16,23 triliun, yang menghubungkan daerah Cikunir hingga Karawang Barat. Proyek ini diinisiasi antara tahun 2016 hingga 2020 oleh PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) dengan tujuan mengurangi kemacetan sekaligus mempercepat distribusi logistik dan mobilitas menuju kawasan industri di Jawa Barat (Zultaqawa et al., 2024).

Namun, proyek strategis ini menjadi sorotan lantaran terindikasi kuat praktik korupsi yang merugikan negara sebesar Rp510 miliar, yang terdakwa dalam kasus ini Djoko Dwijono (mantan pejabat pelaksana proyek), Yudhi Mahyudin (ketua panitia lelang), Sofiah Balfas dan Tony Budianto Sihite (pihak konsultan dan rekanan), dituduh melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Tipikor Jakarta (30 Juli 2024), ditemukan 7 bentuk penyimpangan dalam proyek tersebut:

1. Manipulasi Tender – Panitia lelang memberikan keuntungan kepada konsorsium KSO Waskita-Acset tanpa melakukan evaluasi dokumen penawaran.
2. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa survei lapangan, hanya berdasarkan referensi dari pihak pelaksana proyek.
3. Perubahan Dokumen Teknis yang mengarahkan spesifikasi pada perusahaan tertentu, yakni PT Bukaka Teknik Utama.
4. Perubahan Desain Girder dari bentuk “P” menjadi “U” tanpa dasar perencanaan, yang berdampak pada penurunan kualitas struktur.
5. Penurunan Mutu Beton dari standar K500 menjadi FC 35 MPa yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan.
6. Tidak Ada Evaluasi dan Pengawasan terhadap hasil pekerjaan proyek.
7. Subkontrakan Seluruh Pekerjaan Utama kepada pihak lain tanpa izin sesuai kontrak.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil penyidikan yang menemukan indikasi pengurangan volume pekerjaan

dugaan Menurut pengungkapan Kejaksaan Agung, para tersangka melakukan tindakan melawan hukum berupa, Pengurangan spesifikasi teknis konstruksi tanpa izin, misalnya mengganti material berkualitas tinggi dengan kualitas rendah, yang secara signifikan mengurangi biaya pembangunan, Pengaturan proses tender sehingga perusahaan tertentu yang sudah dimakan fee dapat memenangkan kontrak tanpa perlakuan adil, Penggelembungan dokumen dan laporan pelaksanaan pekerjaan untuk menutupi pengurangan volume dan mutu.

Modus-modus ini menguntungkan oknum tertentu namun menyebabkan kerugian negara yang besar serta melemahkan kualitas jalan tol (Ristiyanti, 2025). Lalu pada akhirnya kasus korupsi dalam proyek Tol MBZ berdampak luas, terutama pada Pertumbuhan Ekonomi Regional yaitu proyek yang terhambat kualitasnya memperlambat konektivitas dan efisiensi logistik di kawasan industri utama, mengurangi daya saing daerah Jawa Barat. Lalu berdampak pada kualitas Infrastruktur yang dimana Jalan tol mengalami risiko kerusakan lebih cepat dan memerlukan biaya pemeliharaan tinggi sehingga menghambat fungsi ekonomi dan juga kepercayaan Publik yang menjadi penurunan kepercayaan pada proyek pemerintah dan lembaga terkait, yang berpotensi menimbulkan sikap apatis dan ketidakpercayaan pada birokrasi.

Pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan KPK terus mengusut tuntas kasus ini sebagai bagian dari komitmen memberantas korupsi di sektor infrastruktur. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan penetapan tersangka sebagai langkah penting pemberantasan korupsi di BUMN dan badan usaha milik negara yang menangani proyek infrastruktur (CNBC Indonesia, 2023). Pengadilan telah menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara dan denda kepada sejumlah pelaku korupsi terkait proyek ini. Kasus ini menjadi peringatan serius bagi pengelolaan proyek pembangunan infrastruktur, mendorong reformasi pengawasan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di masa depan.

D. Penutup

Korupsi terbukti menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan di daerah dan memperburuk perubahan sosial di Indonesia. Praktik korupsi yang berlangsung secara sistematis dalam birokrasi, pengadaan barang dan jasa, serta proyek infrastruktur menyebabkan distorsi dalam pengalokasian anggaran, menurunkan kualitas infrastruktur, serta melemahkan pertumbuhan ekonomi daerah

Studi kasus proyek Tol MBZ menunjukkan bahwa korupsi dalam proyek strategis menyebabkan kerugian besar bagi negara dan merusak integritas pembangunan infrastruktur. Penyimpangan seperti manipulasi tender, penurunan spesifikasi teknis, dan pengurangan volume pekerjaan membuktikan bahwa korupsi berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa korupsi menjadi penghambat utama pembangunan berkelanjutan dan pemerataan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang menyeluruh dan konsisten.

E. Referensi

- Akbar, M. R. (2025). *KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH:KAJIAN LITERATUR*. *Socius: Jurnal Sosiologi dan Humaniora*, 10(2), 98-117.
- Amalia, S. (2022). ANALISIS DAMPAK KORUPSI PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS KORUPSI PEMBANGUNAN SHELTER TSUNAMI DI KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), hal. 54–76.
- Anjarwati Dwi. (2012). CLUSTERING PENINDAKAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA MENGGUNAKAN K-MEANS: ANALISIS DATA KPK TAHUN 2004-2024. *Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 12. <http://jurnal.mdp.ac.id>
- Antrag, I. La, Situmaeng, Y. T., Arinda, S., & Rochim, A. A. (2024). *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung* (Vol. 3, Issue 02). <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Aulia, I., Dwi Aryanti, R., & Marlina, L. (2025). *HARE: Sharia Economic Review KASUS KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PT DUTA PAL*

- Syuraida, H., & Pendidikan Sejarah, J. (2015). PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA ERA ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI. In *Journal Pendidikan Sejarah* (Vol. 3, Issue 2).
- Zultaqawa, Z., Donie Aulia, M., Sidik Ginanjar, Y., Ali, C., Zakaria, F., & Ravena, D. (2024). *ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK JALAN TOL MBZ*. 7(1). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.14599>